PERKEMBANGAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE CINA: ANCAMAN DANIMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT

Nurul Minchah

Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
E-mail: nurulminchah@gmail.com

ABSTRAK

Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Cina tidak hanya pada sektor ekonomi saja, namun berkembang ke berbagai sektor salah satunya adalah sektor teknologi dan industri. Obsesi Amerika Serikat dan Cina yang ingin mendominasi teknologi dunia membuat persaingan di kedua negara semakin ketat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa inovasi di bidang teknologi industri atau penggabungan keduanya yang dikeluarkan oleh kedua negara. Seperti Cina yang berfokus pada sepuluh bidang utama untuk memainkan perang utama dalam peningkatan strategi industri termasuk next-generation IT, robotics, aerospace, farmasi dll untuk menjadikan Cina sebagai new superpower country dan dapat bersaing secarainternasional. Ambisi Cina untuk menguasai dunia mendapat dukungan dari Presiden Xi Jinping yang memperkenalkan "Belt and Road Initiative" pada 2013. Tujuan dari Belt and Road Initiative adalah mempersatukan dan mengintegrasikan Cina, Rusia, Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika dengan dunia. Cina mewujudkan tujuan tersebut dengan mendirikan Silk Road Fund dan mendirikan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Selain itu perkembangan teknologi Cina yang didukung dengan prinsip "copycat"versi Cina membuat penemuan berbagai artificial intelligence di negara ini semakin maju. Hal tersebut semakin membuat Amerika Serika merasa insecure, terlebih ketika salah satu perusahaan asal Cina yakni Huawei menemukan teknologi face recognition yang menurut Amerika Serikat dapat menjadi suatu ancaman spionase bagi pemerintah Cina. Alasan Amerika Serikat tersebut berdasarkan paham Komunis Cina yang mewajibkan perusahaan menyerahkan perusahannya atau dapat diambil alih oleh pemerintah Cina karena menjadi milik negara. Sehingga Amerika Serikat semakin gencar untuk melarang Huawei berkembang yakni dengan membatasi distribusi berbagai produk dari Huawei, melarang Huawei melakukan transaksi jual beli bahan baku produk yang berasal dari Barat, dan berbagai kebijakan lainnya. Kemudian berimplikasi tidak hanya produk dari Huawei saja namun meluas ke berbagai produk keluaran Cina. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan alasan Amerika Serikat merasa tidak aman dan terancam dengan teknologi yang sedang dikembangkan oleh Cina yang diawali dengan cara mengidentifikasi peningkatan artificial intelligence milik Cina. Selain itu tulisan ini akan menjelaskan perbedaan pemahamandi kedua negara dalam menjustifikasi kasus tersebut dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Amerika Serikat merasa tidak aman dengan peningkatan Cina di berbagai sektor yang ada terutama di sektor teknologi. Lebih lanjut akan dijelaskan bagaimana cyber security theory yang digunakan dapat menunjukkan berbagai ancaman keamanan akibat perkembangan teknologi yang mungkin terjadi. Suatu negara dapat melakukan berbagai upaya proteksionisme terhadap keamanan siber sehingga tidak mengancam kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional negara tersebut.

Kata Kunci: Cina, Amerika Serikat, Artificial Intelligence, dan Cyber Security

ABSTRACT

The trade war between United States and China is not only in the economic sector, but has expanded to various sectors, such as technology and industrial sectors. The obsession of the United States and China todominate world technology has resulted into fierce competition between the two countries. The proof is some innovations in the field of industrial technology or the merger issued by the two countries. As seen inChina's effort in the main field to play a major war in improving industrial strategies including next generation IT, robotics, aerospace, pharmaceuticals etc. Those are China's focuses in attempt to turn themselves into a new superpower country and be able to compete internationally. China's ambition to dominate the world has gained the support of President Xi Jinping who introduced the "Belt and Road Initiative" in 2013. The goal of the Belt and Road Initiative is to unite and integrate China, Russia, Asia, Europe, Middle East, and Africa into one connected world. China realizes this goal by establishing the Silk Road Fund and establishing the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). In addition, the "copycat" based development principles of Chinese technology has made the discovery of various artificial intelligence in the country become more advanced. This has escalated in the United States' sense of insecurity, especiallywhen one of China's tech-based company, namely Huawei, has advanced in face recognition technology, which according to the United States is a security threat and could be a potential espionage attempt from the Chinese government. The motive behind United States' insecurity is due to China's Communist Ideologywhich requires every company to hand over their information to state's government or they will lose their company's permit. That's a strong reason for United States to prohibits Huawei aggressively from developing, to the point of limiting the distribution of various products from Huawei; prohibiting Huawei from purchasing raw materials from Western products; and other policies. It had affected not only to Huawei's product, but also other Chinese company products. The purpose of this paper is to explain why the United States feels insecure and threatened with technology being developed by China that begins with identifying the increase of China's artificial intelligence. In addition, this paper will explain the differences inunderstanding between the two countries in justifying the case and what factors are causing the United States to feel insecure by the rise of China in various sectors, especially in the technology sector.Furthermore, it will be explained how the cyber security theory used in this paper is able to indicate varioussecurity threats due to technological developments that may occur. A country can carry out various protectionism measures against cyber security so that it does not threaten the state's sovereignty and interfere with the state's national interests.

Keywords: China, United States, Artificial Intelligence, and Cyber Security

PENDAHULUAN

Perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat berawal ketika Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump mengeluarkan suatu kebijakan proteksionisme. Kebijakan proteksionisme adalah ketika suatu negara berusaha melindungi industri dalam negeri dari persaingan Internasional. Proteksionisme meliputi usaha yang dilakukan oleh suatu negara dalam bentuk apapun untuk memberlakukan pembatasanperdagangan barang dan jasa yang

mempunyai tujuan untuk melindungi bisnis dan industri dalam negeri dari persaingan Internasional serta mencegah hasil yang dihasilkan dari interaksi kekuatan pasar penawarandan permintaan. Kebijakan proteksionisme dapat diimplementasikan dalam tarif, kuota impor, standar produk, dan subsidi pemerintah.

Kebijakan terkait proteksionisme yang dikeluarkan oleh Trump berupa menaikkan tarif impor produk yang berasal dari Cina. Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan bea masuk sebesar 20 persen untuk impor 1,2 juta mesin cuci rumah tangga ukuran besar untuk tahun pertama, dan 50 persen untuk mesin di atas ukuran tersebut (Liu, 2018). Bea masuk akan turun menjadi masing-masing sebesar 16 persendan 50 persen pada tahun ketiga (Liu, 2018). Impor sel-sel surya dan modul dikenakan bea masuk sebesar30 persen untuk tahun pertama, yang kemudian akan turun menjadi 15 persen pada tahun keempat (Liu, 2018). Sementara solar sel yang berkapasitas 2,5 gigawatt yang belum dirakit tidak dikenakan bea impor setiap tahunnya (Liu, 2018). Bea masuk yang ditetapkan untuk impor mesin cuci melebihi batas yang ditentukan dari International Trade Commission (ITC), sedangkan bea masuk untuk panel surya lebih rendah dari yang diharapkan oleh produsen domestik.Selain tarif impor yang telah ditentukan, Trump jugamenginstruksikan kepada Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat untuk menerapkan tarif impor tambahan untuk berbagai produk yang berasal dari Cina. Tarif tambahan tersebut bernilai 100 miliar dollarAS (Anthony W. Chen, 2019).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump sangat merugikan bagi Cina dimana pemasukan terbesar Cina berasal dari kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan pemasukan devisa Cina yang kemudian membuat Presiden Cina, Xi Jinping melakukan aksi balasan kepada Amerika Serikat. Cina menerapkan tarif impor daging babi dari Amerika Serikat sebesar 25 persen, dan tarif 15 persenatas produk pipa baja, buah, dan anggur (wine) (Diah, 2018). Kementerian Perdagangan Cina juga telah mengajukan daftar 128 jenis barang yang berpotensi untuk dikenakan tarif. Hal tersebut yang membuat persaingan dagang antara Amerika Serikat dan Cina semakin memanas karena kedua negara inginmemenuhi kepentingan nasionalnya. Ambisi kedua negara yang diiringi oleh berbagai kebijakan yang dibentuk untuk menjadikan negaranya lebih superior dibanding negara lain menjadikan faktor pendukungpersaingan tersebut.

Ambisi Cina untuk menguasai dunia mendapat dukungan dari Presiden Xi Jinping yang memperkenalkan "Belt and Road Initiative" pada 2013. Tujuan dari One Belt and Road

Initiative adalah mempersatukan dan mengintegrasikan Cina, Rusia, Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika dengan dunia. Cina mewujudkan tujuan tersebut dengan mendirikan Silk Road Fund dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (Fund, 2015). AAIB mempunyai tujuan memfasilitasi dan mempercepat peningkatan infrastukturdi wilayah Jalur Sutera Baru (The New Silk Road Initiative) dengan cara memberikan pinjaman modal danlayanan teknis (Yu, 2017). Dengan adanya AIIB dan One Belt and Road Initiative menempatkan Cina sebagai negara dengan pusat geoekonomi dan geopolitik di kawasan serta memperkuat hubungan ekonomi dengan negara di Asia lainnya.

Perang dagang yang terjadi diantara kedua negara tidak hanya pada sektor ekonomi saja, namun berkembang ke berbagai sektor salah satunya adalah sektor teknologi dan industri. Amerika Serikat dan Cina ingin mendominasi teknologi dunia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa inovasi di bidang teknologi industri atau penggabungan keduanya yang dikeluarkan oleh kedua negara. Seperti Cina yang berfokus pada sepuluh bidang utama untuk memainkan perang utama dalam peningkatan strategi industri termasuknext-generation IT, robotics, aerospace, farmasi dll untuk menjadikan Cina sebagai new superpower country dan dapat bersaing secara internasional. Sementara AS yang kita tahu dengan berbagai aplikasi dan software serta penemuan perusahaan tersohor seperti apple, microsoft, google, dll (Anthony W. Chen, 2019).

Kai Fu Lee dalam bukunya "AI Super-Powers: China, Silicon Valley, and the New World Order" (Lee, 2018), menjelaskan perkembangan artificial intelligence Cina yang awalnya berada di posisi tertinggal jauhdari Amerika Serikat yang telah lebih dulu mengalami perkembangan pesat, menjadi saingan baru Amerika Serikat di bidang teknologi artificial intelligence. Antusiasme perkembangan artificial intelligence Cina telah menyebar secara serentak di berbagai bidang dan lapisan masyarakat baik itu teknologi, bisnis, pembuatan kebijakan pemerintahan dan sekolah-sekolah. Perusahan artificial intelligence di Cina dan peneliti bersama-sama membuat berbagai penemuan dan inovasi baru untuk mendukung revolusi ekonomi Cina. Hal ini yang dapat mengubah Cina menjadi negara adidaya sebagai penyeimbang nasional bagi Amerika Serikat dalam teknologi artificial intelligence. Kedua negara ini memilih untuk bersaing dan bekerja sama dalam artificial intelligence akan memiliki implikasi dramatis bagi ekonomi dan tata kelola global.

Tercapainya new world order yakni Cina sebagai acuan baru dan pesaing Amerika

Serikat di berbagai bidang didukung oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Cina dan sumber daya manusia yang dimiliki. Pemerintah Cina memiliki program dengan mengirimkan warganya untuk menempuh pendidikan di luar negeri dengan syarat harus kembali ke Cina dan menerapkan apa yang sudah dipelajari sehingga Cina mampu berkembang dan tidak kalah saing dengan negara lain. Pembuatan saranaprasarana berupa laboratorium dan tempat penelitian lainnya yang sepenuhnya mendapat fasilitas dan biaya dari negara semakin mendukung keberhasilan Cina (Lee, 2018).

Menurut China AI Development Report 2018 (Policy, 2018), sejak 2015 Cina telah merilis serangkaian rencana strategis nasional di bidang artificial intelligence serta kebijakan-kebijakan seperti Made in China 2015, internet +, dan rencana pengembangan artificial intelligence generasi berikutnya yang merupakan inisiatif kebijakan gabungan dari pemerintah pusat dan daerah yang mendorong pesatnya perkembangan AI di negara ini. Analisis perkembangan AI Cina berdasarkan empat perspektif yang telah dijalankan yakni pengembangan teknologi dan industri, aplikasi pasar, strategi pengembangan dan lingkungan kebijakan, serta persepsi sosial dan dampak yang dihasilkan secara umum.

Keberhasilan Cina di berbagai sektor membuat Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnyamerasa insecure. Jepang, Australia, dan New Zealand bergabung dengan Amerika Serikat dalam hal melarang peralatan telekomunikasi Cina dari jaringan 5G mereka yang kemudian diikuti oleh Kanada, Perancis, Italia, dan Inggris. Amerika Serikat meningkatkan tariff impor senilai 200 miliar dollar, jika Cina gagal memenuhi tuntutan Amerika Serikat (Shephered, 2019). Pengenalan tagihan pada 16 Januari 2019 yang akan membatasi apa yang bisa dijual oleh perusahaan Amerika Serikat ke perusahaan telekomunikasi Cina semakin menambah tekanan pada Cina (Shephered, 2019).

Salah satu perusahaan teknlogi asal Cina yang menerima larangan untuk masuk di pasar Amerika Serikat adalah Huawei. Amerika Serikat menuduh Huawei menyesatkan bank global dan otoritas Amerika Serikat mengenai hubungannya dengan anak usaha, Skycom dan Huawei Device USA, demi menjalankanbisnis di Iran. Selain itu, Amerika Serikat juga menuduh anak usaha Huawei mencuri rahasia dagang, penipuan transfer bank, dan menghalangi proses hukum dengan dugaan mencuri teknologi robotik milik T-Mobile US Inc (Vaswani, 2019). Tuduhan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Cina karena berbagai teknologi yang diciptakan oleh Huawei yakni face recognition yang dapat memantau berbagai kegiatan

pengguna teknologi tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan dapat dipantau dan digunakan untuk kegiatan mata-mata oleh pemerintah Cina.

Terdapat perbedaan paham menurut perspektif pemerintah Cina dan juga Amerika Serikat. Menurut Amerika Serikat yang berdasarkan capaian Cina di bidang artificial intelligence, peningkatan teknologi tersebut dinilai mengancam terutama dalam aspek keamanan cyber. Ancaman keamanan cyber adalah suatu kondisi, situasi, dan kemampuan yang dinilai dapat melakukan tindakan, gangguan, dan serangan yang mampu merusak dan merugikan sehingga mengancam kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) sistem dan informasi (Indonesia, 2012). Ancaman yangmuncul dari media cyberspace disebut cyber threat.

Pelaku ancaman dapat berasal dari suatu negara atau non pemerintah, yakni individu, kelompok maupun organisasi lain yang berasal dari negara sendiri atau negara lain. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar, kondisi sosial, sumber daya manusia, dan perkembangan teknologi (Frederick, 2011), seperti berikut:

- Intelijen Asing (foreign intelligence service)
- Kekecewaan (dissaffected employees)
- Investigasi Jurnalis (investigative journalists)
- Organisasi Ekstrimis (Extremist Organization)
- Aktivitas yang dilakukan para peretas (hacktivist)
- Kelompok Kejahatan yang Terorganisir (Organized Crime Group)

Menurut perspektif liberalisme dalam menanggapi kasus peningkatan teknologi artificial intelligence Cina merupakan suatu hal yang melanggar hak dan kebebasan individu. Perspektif liberalisme yang mengidentifikasi dengan prinsip dasarnya yakni mengenai kebebasan individu serta keyakinan akan pentingnya kebebasan moral, hak-hak, serta kewajiban untuk diperlakukan dan memperlakukan orang lainsesuai nilai dan norma yang berlaku (Doyle, 1983). Amerika Serikat yang menggunakan perspektif liberalisme untuk menjustifikasi tindakan Huawei terkait face recognition yang dapat memantau berbagai kegiatan pengguna teknologi tersebut merupakan suatu perilaku yang melanggar hak-hak kebebasan individu. Terlebih dengan asumsi bahwa implikasinya dapat digunakan oleh Pemerintah Cina sebagai alat spionase suatu negara terhadap negara lain. Hal ini dikarenakan Cina yang menganut paham sosialis- komunis dimana semua perusahaan berada di bawah

negara dan dalam kontrol negara sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan walau milik perseorangan atau kelompok selama perusahaan tersebut milik masyarakat Cina akan menjadi milik Pemerintah Cina juga.

Berdasarkan uraian dan argumen di atas memberikan gambaran bahwa terdapat dampak dari tradewar yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Cina yang merubah perang dagang menjadi perang teknologi (artificial intelligence) dengan diciptakannya berbagai penemuan seperti teknologi face recognition oleh salah satu perusahaan asal Cina yakni Huawei. Teknologi tersebut menyebabkan ketakutanbagi Amerika Serikat karena dapat diduga sebagai suatu alat spionase Pemerintah Cina terhadap Amerika Serikat untuk menguasai dunia. Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian, "Mengapa Amerika Serikat merasa terancam dengan perkembangan teknologi artificial intelligence Cina dan apa implikasinya terhadap keamanan nasional?". Tujuan penulisan adalah untuk menjelaskan alasan Amerika Serikat merasa tidak aman dan terancam dengan teknologi yang sedang dikembangkan oleh Cina. Penelitian ini diawali dengan cara mengidentifikasi peningkatan artificial intelligence Cina yang ditandai dengan penemuan di bidang teknologi. Selain itu tulisan ini akan menjelaskan perbedaan pemahaman di kedua negara dalam menjustifikasi kasus tersebut dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Amerika Serikat merasa tidak aman dengan peningkatan Cina di berbagai sektor yang ada terutama di sektor teknologi. Lebih lanjut akandijelaskan bagaimana cyber security theory yang digunakan dapat menunjukkan berbagai ancaman keamanan akibat perkembangan teknologi yang mungkin terjadi. Suatu negara dapat melakukan berbagai upaya proteksionisme terhadap keamanan siber sehingga tidak mengancam kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional negara tersebut.

Adapun signifikansi yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu memberikan kontribusi akademik dalam perkembangan kajian terkait ancaman keamanan siber yang kemudian mempengaruhi suatu negara untuk mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi negaranya dari ancaman keamanan siber tersebut. Penelitian ini juga menganalisis terkait perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan Cina dalam menjustifikasi suatu kebijakan yang dikeluarkan atau masih merupakan persepsi suatu negara terhadap negara lain yang belum terbukti secara empirik dalam mengeluarkan kebijakan terhadap ketakutan akan ancaman keamanan negara. Secara khusus penelitian ini berusaha memberikan kontribusi

empirik untuk dapat menjadi salah satu pertimbangan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan yang berhubungan dengan hubungan antara Amerika Serikat dan Cina dalam perkembangan teknologi artificial intelligence serta dampaknya dari perkembangan tersebut terhadap berbagai sektor kebijakan lainnya.

KERANGKA ANALISIS

Threat Perception Theory

Penulis mencoba menganalisis menggunakan Teori Persepsi Ancaman yang dikemukakan oleh Robert Jervis. Teori Persepsi ancaman yang dikemukakan oleh Robert Jervis dalam bukunya yang berjudul Perception and Misperception in International Politics menjelaskan bahwa persepsi ancaman yang digunakan oleh aktor dalam menciptakan keputusan terhadap aktor lainnya, "…crucial decisions is impossible without considering the decision-makers' beliefs about the world and the images of others." (Jervis, 1976) Perception tidak hanya terdiri dari images saja namun juga belief dan intentions sebagai elemen penentu perilaku suatu negara. Ketiga elemen tersebut sering terjadi miskalkulasi terhadap power negara dan power negara lawan yang akhirnya menimbulkan mispersepsi atas hubungan antar negara tersebut. Pembuatan keputusan merupakan suatu proses menyimpulkan interaksi aktor yang berdasarkan ekspetasi perilaku negara lain yang mengacu dengan lingkungan sekitar mereka. Robert Jervis juga menegaskan bahwa penggunaan istilah "intentions" bukan sebagai cerminan dari negara lain yang diartikan untuk mencapai tujuan tertentu atau kepentingan, namun lebih sebagai "...the collection of actions the state will or would take because that is what others are trying to predict." Meski suatu persepsi kemudian bukan menjadi alasan utama yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku aktor, namun persepsi yang ditangkap oleh aktor lain memberikan dampak yang lurus dengan bagaimana suatu kebijakan diambil. Selain itu Robert Jervis juga memaparkan tiga alternatif level analisis:

1. Bureaucratic Level. Pada level ini pilihan ditentukan oleh posisi di dalam struktur organisasi. Ketika perilaku negara tidak dapat dijelaskan dengan kodisi politik internal dan lingkungan eksternal. Cara kerja birokrasi dapat menentukan kebijakan. Kebijakan luar negeri adalah hasil dari aktivitas tawar-menawar dan rutinitas di dalam struktur birokrasi tersebut.
2. Level of Domestic Determinants. Pada level ini variasi dalam pembuatan kebijakan

menggambarkan variasi dalam struktur sosial dan ekonomi dan politik domestik.

3. Level of the International Environment. Reaksi negara disesuaikan dengan situasi eksternal. Untuk mengemukakan bahwa lingkungan eksternal menentukan perilaku sebuah negara dinyatakan bahwa seluruh negara bereaksi secara bersamaan dalam menghadapi objek situasieksternal yang sama.

Selain Robert Jervis, Elena Andreeva (Andreeva, 2016) menyatakan dalam tulisannya yang berjudul"The Impact of Threat Perception on National Role Conceptions: The Cases of Turkey and Russia" bahwa adanya persepsi ancaman adalah pemikiran utama yang diturunkan dari pemikiran realisme. Adanya perubahan dalam perimbangan kekuatan memberikan perasaan lebih tidak aman jika dipandang dari karakter anarki dalam sistem internasional. Persepsi ancaman diukur dari bagaimana aktor meletakkan antisipasinya terhadap aktor lainnya. Adanya perilaku yang mengacu pada keterkaitan atau hubungan antar aktor juga memicu munculnya persepsi ancaman. Beberapa hal yang penting untuk dipahami dalam menciptakan argumentasi munculnya persepsi ancaman adalah:

1. Terdapat hubungan sejarah antar aktor yang saling berkaitan;
2. Terdapat pengalaman antar aktor yang berlandaskan ancaman di masa lalu;
3. Terdapat keseimbangan kapabilitas misalnya dalam bidang militer, diplomatik, atau ekonomi;
4. Terdapat faktor struktural yang ada diantara aktor;
5. Rekam jejak keterlibatan aktor dalam tatanan hukum yang diikuti bersama; dan
6. Terdapat isu dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan yang menyinggung diantara aktor atau wilayah aktor.

Dari paparan tersebut jelas bahwa adanya persepsi ancaman memang dikendalikan dari keterkaitanbeberapa faktor yang menyinggung aktor yang dianggap mengancam dan merasa terancam. Selain itu, ancaman diketahui berbentuk bukan dari suatu pandangan yang statis melainkan mengalami perkembangan yang fluktuatif dan dinamis dalam hubungan antar aktor.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif itu sendiri ialah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati, berfokus pada proses-proses yang terjadi dan khususnya berusaha memahami bagaimana sesuatu itu muncul (Creswell, 2009). Sementara menurut Alan Bryman, penelitian kualitatif merupakan sebuah strategi penelitian yang menekankan pada kata-kata dan bukan pada kuantifikasi dalam kumpulan dan analisis data. Metode penelitian kualitatif menekankan pada deskripsi konteks karena bahasan detail sangat penting menunjukkan signifikansi subyek penelitian dan menyediakan penjelasan tentang konteks dimana suatu kejadian yang menjadi fokus penelitian terjadi (Bryman 2004). Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis kualitatif karena dapat menunjukkan penyebab Amerika Serikat merasa terancam dengan perkembangan teknologi artificial intelligence Cina dan implikasinya terhadap keamanan nasionalAmerika Serikat.

Penelitian kualitatif sendiri dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumberbaik sumber tertulis ataupun sumber langsung. Kelebihan metode ini adalah lebih mudah dalam mendapatkan informasi tanpa harus mengumpulkan data dan melakukan penghitungan agar diperoleh data yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Selain itu metode kualitatif tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengolahan data sehingga lebih menghemat waktu. Dalam penelitian ini metode kualitatif yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif historik. Pendekatan deskriptif historik merupakan pengumpulan dan evaluasi data secara sistematis berkaitan dengan dengan kejadian masa lampau untuk menguji kebenaran suatu isu yang berkaitan dengan sebab akibat atau kecendrungan kejadian-kejadian yang dapat membantu menggambarkan atau menerangkan kejadian masa kini dan mengantisipasi kejadian dimasa yang akan datang. Pendekatan ini menggambarkan kejadian masa lalu yang dapat digunakan untuk menjadi proses pembelajaran masyarakatsekarang (Nanang, 2011). Metode ini digunakan sebab dapat mempermudah megidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan Amerika Serikat yang kemudian menganggap perkembangan dan peningkatan artificial intelligence Cina sebagai ancaman.

Penulis juga melalui serangkaian tahap dalam melakukan penelitian ini yang bersumber dari data primer dan sekunder. Tahap-tahap tersebut yakni penemuan fokus, pengembangan kerangka teori, penemuan metodologi, analisis temuan, dan pengambilan kesimpulan. Dari satu tahap ke tahap berikutnyatidak terdapat batas waktu yang mengikat, dan dapat selalu kembali ke tahap sebelumnya untuk melakukanperbaikan atau memasukan serta

mengurangi apa yang sebelumnya telah ditulis. pendekatan deskriptif historik. Data dikumpulkan sejak mulai perang artificial intelligence antara Amerika Serikat dengan Cina hingga kasus Huawei yang menerima larangan untuk masuk di pasar Amerika Serikat dan memperoleh kasus hukum.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan ini adalah model Miles dan Huberman. Dalam model Miles dan Huberman (Huberman, 1992) terdapat tiga tahapan, yakni: Data Reduction atau reduksi data adalah, memilah poin-poin penting sehingga memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data. Data yang telah direduksi akan menghasilkan data yang berbentuk uraian singkat dan dengan gambaran jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data lanjutan.

Data Display merupakan sekumpulan informasi yang telah disusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Bentuk penyajian datanya dapat berupa matriks, grafik, bagan, dan lain sebagainya. Conclusion Drawing/Verification merupakan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

Kasus yang menjadi fokus analisis penelitian ini adalah Amerika Serikat yang merasa terancam dengan perkembangan teknologi artificial intelligence Cina dan implikasinya terhadap keamanan nasionalAmerika Serikat. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan data yang sesuai dengan studi kasus yang diteliti. Bentuk-bentuk data umumnya berupa dokumen dan literatur ilmiah yang mendukung penelitian. Adapun dokumen dan literatur yang diambil berupa data sekunder yang dikumpulkan penulis melalui buku-buku teks, jurnal politik dan ekonomi, serta berita-berita yang memuat tentang studi kasus yang dipilih.

PEMBAHASAN

Ambisi Cina untuk menjadi salah satu negara super power adalah dengan arahan dari Presiden Xi Jinping yakni dengan peningkatan di berbagai sektor. Salah satu arahan kebijakan Cina yang dikeluarkan oleh Presiden Xi Jinping adalah peningkatan di sektor teknologi. Selama beberapa tahun terdapat perubahan yang signifikan terkait teknologi Cina. Peningkatan

teknologi dinilai sebagai alat bantu untuk meningkatkan industrialisasi di Cina yang menyebabkan perekonomian dapat berkembang pesat atau "national economic strategic adjustment and restructuring" (Indrajit, 2019). Dengan adanya peningkatanteknologi Cina ini dapat membuat Cina menjadi negara super power dan siap bersaing dengan negara super power lainnya.

Salah satu perkembangan teknologi Cina adalah Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Artificial Intelligence dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel (Haenlein, 2019). Kecerdasan buatan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Bidang yang memakai AI adalah permainan computer (games), logika fuzzy, jaringan saraf tiruandan robotika (Haenlein, 2019).

Perkembangan AI di Cina dimulai ketika Matthew Scott dipindah kerja dari Amerika Serikat ke Cina sebagai insinyur Microsoft pada 2006 (Lee, 2018). Ketika disana ia, mulai membangun bisnis startup sendirikarena menurutnya Cina adalah lokasi terbaik untuk AI. Dengan adanya dukungan prinsip copycat yang selama ini menjadi landasan Cina dapat membuat perkembangan inovasi terknologi tersebut semakin baik. Prinsip copycat adalah prinsip meniru produk diluar buatan Cina dan dibuat ulang dengan bahan baku yang jauh lebih murah, kualitas produk yang dapat bersaing dengan produk asli, dan dijual dengan harga yang murah (Lee, 2018). Shenzen adalah salah satu tempat yang sangat terkenal sebagai kota pembuat barang imitasi atau palsu, telah berubah menjadi lokasi teknologi yang mampu melakukan apa yang tidak bisa Silicon Valley lakukan yakni menggabungkan inovasi dan wirausaha dengan industri manufaktur. Menurut Matthew, semua orang menggunakan kecerdasan buatan menggunakan teknologi Cina dan tanpa itu kita tidak akan semaju sekarang. Cina tidak hanya menyerap inovasi dunia namun juga melahirkan inovasi baru(Lee, 2018).

Pemerintah Cina juga mengeluarkan kebijakan Made in China 2025, berisi kebijakan industri yang dipimpin oleh negara yang berupaya menjadikan Cina sebagai negara yang dominan dalam manufaktur teknologi tinggi secara global. Program ini bertujuan untuk menggunakan subsidi pemerintah, memobilisasi perusahaan milik negara, dan mengejar

akuisisi kekayaan intelektual untuk mengejar ketinggalan — dan kemudian melampaui — kecakapan teknologi Barat di industri maju (Relations, 2019). Made in China 2025 adalah rencana sepuluh tahun pemerintah untuk memperbarui basis manufaktur Cina dengan mengembangkan sepuluh industri teknologi tinggi dengan cepat. Yang paling utama adalah mobillistrik dan kendaraan energi baru lainnya, teknologi informasi (TI) dan telekomunikasi generasi mendatang,serta robotika canggih dan AI (Relations, 2019).

Pesatnya perkembangan teknologi di Cina dapat mengurangi ketergantungan Cina pada teknologi asing (Amerika Serikat atau negara Barat lainnya) dan mempromosikan produsen teknologi tinggi Cina di pasar global. Semikonduktor adalah bidang yang sangat ditekankan, mengingat sentralitasnya untuk hampir semua produk elektronik. China menyumbang sekitar 60 persen dari permintaan global untuk semikonduktor tetapi hanya memproduksi sekitar 13 persen dari pasokan global (Relations, 2019). Made inChina 2025 menetapkan target spesifik: pada tahun 2025, China bertujuan untuk mencapai 70 persen swasembada di industri teknologi tinggi, dan pada tahun 2049 — peringatan seratus tahun Republik RakyatCina — Cina mencari posisi dominan di pasar global.

Kemajuan teknologi dunia dan didukung oleh beberapa kebijakan pengembangan dari Pemerintah Cina membuat perusahaan-perusahaan teknologi di Cina mulai melakukan berbagai inovasi di berbagai bidang untuk dapat bersaing secara global. Salah satunya adalah Huawei. Huawei merupakan penyedia peralatan jaringan terbesar di dunia dan produsen smartphone terbesar kedua dunia. Ketika Amerika Serikat sedang mengembangkan jaringan 4G, Huawei sudah menggunakan jaringan 5G. Karena sudah selangkah lebih maju dari negara Barat, Huawei dapat menjadi penguasa 5G yang dalam 5 tahun ke depan dan diperkirakan bias mencapai nilai 123 miliar dollar AS (Kompas, 2019).

5G merupakan teknologi jaringan yang akan menghubungkan segala hal seperti mobil otonom, robot industry, peralatan rumah sakit, hingga berbagai produk elektronik lainnya. Kekuatan teknologi ada pada kecepatannya yang bisa mencapai 20 gigabit per detik. Untuk mencapai kecepatan tersebut terdapatdua cara. Pertama, dapat menggunakan frekuensi yang sama dengan 4G atau Wi-fi, tetapi dengan skema coding yang lebih efisien dan saluran yang lebih besar sehingga kecepatannya meningkat 25-50 persen. Kedua, dengan menggunakan frekuensi gelombang millimeter yang bisa mengirimkan data pada kecepatan yang lebih tinggi. Cara kedua membutuhkan jarak yang lebih dekat sehingga transmitter yang

dibutuhkan menjadi lebih banyak (Kompas, 2019). Selain itu 5G juga menggunakan teknologi full duplex yang membuat transmitter dan piranti mengirimkan dan menerima data pada frekuensi yang sama tanpamengganggu satu sama lain. Selain itu, 5G juga menggunakan teknologi multiple input (MIMO) dimana ratusan antenna bekerja secara parallel untuk meningkatkan kecepatan dan menurunkan jeda waktu untukmengirimkan paket data yakni dari 30 milidetik pada 4G menjadi satu milidetik pada 5G (Kompas, 2019).

Selain 5G, Huawei juga menggunakan teknologi AI face recognition di perangkat terbarunya baikitu di smart phone atau di kamera pengawas. Huawei mengatakan teknologi pengawasan videonya dapat memindai jarak jauh untuk mendeteksi "perilaku abnormal" seperti berkeliaran, melacak pergerakan mobildan orang, menghitung ukuran kerumunan, dan mengirim peringatan ke pusat komando jika mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. Otoritas setempat kemudian dapat bertindak berdasarkan informasi yang mereka terima (News, 2019). Sehingga dapat disimpulkan teknologi AI face recognition Huawei ini dapat memantau pergerakan seseorang dan identitas selama orang tersebut masuk ke dalam jangkauan kamera pengawas. Teknologi baru ini dianggap sangat bermanfaat untuk menekan angka kriminalitas dan membantu penyelidikan di berbagai sektor pemerintahan. Sehingga banyak negara yang mengadopsi teknologi ini.

Namun terdapat perdebatan terkait keseimbangan antara privasi dan keselamatan, sistem Huaweitelah mendapatkan perhatian ekstra karena tuduhan bahwa undang-undang Cina yang mewajibkanperusahaan untuk membantu pekerjaan intelijen nasional memberikan otoritas akses ke datanya yang mengakibatkan beberapa negara mempertimbangkan kembali menggunakan teknologi Huawei, khususnya jaringan 5G supercepat yang diluncurkan akhir tahun ini. Namun, Huawei, yang menyangkal tuduhan kontrol pemerintah Ciina, tidak mengalami kesulitan menemukan pelanggan yang ingin menginstal apa yang disebut teknologi Safe Cities-nya. Selain Serbia, daftar itu termasuk Turki, Rusia, Ukraina, Azerbaijan, Angola, Laos, Kazakhstan, Kenya, dan Uganda, serta beberapa negara demokrasi liberal seperti Jerman, Prancis, dan Italia. Sistem ini digunakan di sekitar 230 kota, membuat puluhan juta orang menontonnya (News, 2019).

Fokus pembahasan terletak pada teori ancaman keamanan untuk memeriksa proses di mana Chinadan Amerika Serikat telah menggunakan taktik cyber dan dimana serangan ini diarahkan serta mengumpulkan informasi tentang tingkat keparahan dan kemungkinan

implikasi dari ancaman cyber. Amerika Serikat yang menaruh perhatian besar terhadap keamanan cybernya dibuktikan ketika masa Pemerintahan Presiden Obama yang mendirikan suatu lembaga yang diberi nama Cyber Threat Intelligence Integration Center (CTIIC). Lembaga tersebut menjadi pusat intelijen yang menghubungkan berbagai ancaman cyber negara, sehingga departemen atau instansi terkait menyadari adanya ancaman dan dapat berkolaborasi untuk menyelesaikannya. Selain itu, teknologi keamanan cyber sangat dibutuhkan untuk dapat mendeteksi atau melacak teroris. Hal ini membuktikan bahwa Amerika Serikat fokus terhadap keamanan cyber negaranya terutama di bidang surveillance teknologi karena merasa tidak aman dan sebagai tindakan pencegahan kejadian terorisme yang pernah terjadi di masa lampau.

Keamanan dunia maya adalah masalah penting dan besar bagi aktor keamanan nasional. Sebagai contoh pada tahun 2011, pemerintah Amerika Serikat mendeklarasikan serangan dunia maya yang mirip dengan tindakan perang, dapat dihukum dengan cara militer konvensional sebagai bentuk upaya terakhir (Journal, 2011). Misalnya, keterlibatan dunia maya yang diarahkan oleh satu negara ke negara lain dianggapsebagai bagian dari rangkaian konflik normal. Menurut Nye (Maness, The Dynamics of Cyber Conflict Between Rival Antagonists 2001-11, 2014), terdapat pergeseran dalam operasi strategis setelah tahun 2001 karena terorisme, meningkatnya ketakutan akan pertempuran dunia maya dan ancaman telah membawa reorientasi urusan militer. Departemen Pertahanan mencatat teknologi skala kecil dapat memiliki dampak yang tidak proporsional dengan ukurannya; musuh potensial tidak harus membangun sistem senjata yang mahal untuk menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan nasional A.S (Maness, The Dynamics of Cyber Conflict Between Rival Antagonists 2001-11, 2014). Ini adalah indikasi yang jelas bahwa pertempuransedang berubah. Tantangannya adalah bahwa pertempuran asimetris itu nyata dan mungkin direalisasikan melalui konflik dunia maya. Untuk menghadapi ancaman ini, aktor di seluruh dunia mempromosikan berbagai cara dan institusi baru untuk menghadapinya. Contoh sempurna adalah mengapa AS melarang perusahaan menggunakan peralatan jaringan Huawei pada 2012 dan mengapa perusahaan itu ditambahkan ke Biro Industri dan Daftar Entitas Keamanan Departemen Perdagangan AS pada Mei, mengikuti perintah eksekutif dari Presiden Donald Trump yang secara efektif melarang Huawei dari Komunikasi AS. Di sisi lain, Nye juga mendefinisikan perang dunia maya sebagai 'tindakan bermusuhan di dunia maya yang

memiliki efek yang menguatkan atau setara dengan kekerasan kinetik besar'. Kemudian Hersh juga mendefinisikan ancaman dunia maya sebagai networks penetrasi jaringan asing untuk tujuan mengganggu atau membongkar jaringan-jaringan itu, dan menjadikannya tidak dapat dioperasikan (Maness, The Dynamics of Cyber Conflict Between Rival Antagonists 2001-11, 2014). Kekhawatiran kami adalah bahwa untuk mendefinisikan konflik dunia maya di dunia hubungan internasional, kita harus memahami siapa yang menggunakan taktik, di mana, bagaimana, dan tujuannya.

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Amerika Serikat yang berdasarkan capaian Cina di bidang artificial intelligence, peningkatan teknologi tersebut dinilai mengancam terutamadalam aspek keamanan cyber. Ancaman keamanan cyber adalah suatu kondisi, situasi, dan kemampuanyang dinilai dapat melakukan tindakan, gangguan, dan serangan yang mampu merusak dan merugikan sehingga mengancam kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) sistem dan informasi (Indonesia, 2012). Ancaman yang muncul dari media cyberspace disebut cyber threat.Pelaku ancaman dapat berasal dari suatu negara atau non pemerintah, yakni individu, kelompok maupun organisasi lain yang berasal dari negara sendiri atau negara lain. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar, kondisi sosial, sumber daya manusia, dan perkembangan teknologi (Frederick,2011), seperti berikut:

- Intelijen Asing (foreign intelligence service)
- Kekecewaan (dissaffected employees)
- Investigasi Jurnalis (investigative journalists)
- Organisasi Ekstrimis (Extremist Organization)
- Aktivitas yang dilakukan para peretas (hacktivist)
- Kelompok Kejahatan yang Terorganisir (Organized Crime Group)

Sekarang, ancaman dunia maya pemerintah mencakup konflik dunia maya antara aktor pemerintahdan pembuat kebijakan luar negeri. Di sisi lain, konflik cyber organisasi biasanya melibatkan aktor non- negara yang terorganisir seperti jaringan teroris, atau kelompok peretas seperti Anonim. Akhirnya, konflikdunia maya individu akan mencakup tindakan jahat oleh operator tunggal yang berfungsi menyebabkankejahatan, kekacauan, atau kejahatan umum. Keamanan dunia maya adalah istilah yang digunakan untukkemampuan defensif (juga ofensif) negara di dunia maya. Sebagai contoh jika suatu negara mampumematikan

internet dan arus informasi dari masuk atau keluar dari perbatasannya, negara itu dikatakan memiliki pertahanan cyber yang kuat. Dalam hal ini, Cina, Suriah, dan Mesir adalah contoh negara dengankemampuan ini. Amerika Serikat dianggap memiliki kemampuan ofensif yang hebat, yang dapat berfungsisebagai pertahanan yang baik, karena para pemrakarsa dunia maya mungkin berpikir dua kali sebelummenyerang AS karena takut akan pembalasan yang lebih parah. Kemampuan seperti itu harusdipertimbangkan ketika melihat lawan, karena akan diasumsikan bahwa jika suatu negara diberkahi dengan kemampuan untuk menyusup ke musuhnya di dunia maya, maka negara itu akan melakukan hal tersebut.

Menurut perspektif liberalisme dalam menanggapi kasus peningkatan teknologi artificial intelligence Cina merupakan suatu hal yang melanggar hak dan kebebasan individu. Perspektif liberalisme yang mengidentifikasi dengan prinsip dasarnya yakni mengenai kebebasan individu serta keyakinan akan pentingnya kebebasan moral, hak-hak, serta kewajiban untuk diperlakukan dan memperlakukan orang lainsesuai nilai dan norma yang berlaku (Doyle, 1983). Amerika Serikat yang menggunakan perspektif liberalisme untuk menjustifikasi tindakan Huawei terkait face recognition yang dapat memantau berbagai kegiatan pengguna teknologi tersebut merupakan suatu perilaku yang melanggar hak-hak kebebasanindividu. Terlebih implikasinya dapat digunakan oleh Pemerintah Cina sebagai alat spionase suatu negara terhadap negara lain sesuai tudingan Amerika Serikat dalam tuntutannya terhadap Huawei di pengadilan.Hal ini dikarenakan Cina yang menganut paham sosialis-komunis dimana semua perusahaan berada dibawah negara dan dalam kontrol negara. Cina yang merupakan negara dengan paham sosialis-komunisdan berseberangan dengan liberalis semakin membuat Amerika Serikat khawatir karena perbedaan tersebut.

Anggapan Amerika Serikat sejalan dengan apa yang Michael W. Doyle sebutkan dalam bukunya yang berjudul "Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs" bahwa negara republik yang demokrasi cenderung lebih sedikit potensi terjadinya konflik dibanding otarotarian atau kekaisaran karena mereka semua saling menghargai akan kebebasan dan hak asasi satu sama lain. Hubungan internasional diatur oleh persepsi keamanan nasional dan keseimbangan kekuasaan serta menganggap bahwa prinsip dan institusi liberal sangat mengganggu balace of power (Doyle, 1983). Sementara dari segi politik liberal, republik dinilai sebagai landasan moral untuk perdamaian liberal dan menghormati hak-hak yang sah. Seperti apa yang telah disampaikan Kant bahwa negara yang bentuk pemerintahannya republik dapat mengarah ke

hubungan yang damai. Hubungan antara negara liberal yang saling menghormati hukum kosmopotitan/hukum internasional yakni kebebasan berbicara dan berkomunikasi yang efektif serta kerjasama konsensual. Selain itu negara liberal dibatasi oleh rasa saling menghargai untuk hak dan kepentingan liberal.

Cina yang merupakan negara Republik namun menerapkan paham Sosialis-Komunis membuat Amerika Serikat merasa terancam. Seperti Elena Andreeva (Andreeva, 2016) yang menyatakan dalam tulisannya dengan judul "The Impact of Threat Perception on National Role Conceptions: The Cases of Turkey and Russia" bahwa adanya persepsi ancaman adalah pemikiran utama yang diturunkan dari pemikiran realisme. Adanya perubahan dalam perimbangan kekuatan memberikan perasaan lebih tidak aman jika dipandang dari karakter anarki dalam sistem internasional. Persepsi ancaman diukur daribagaimana aktor meletakkan antisipasinya terhadap aktor lainnya. Adanya perilaku yang mengacu pada keterkaitan atau hubungan antar aktor juga memicu munculnya persepsi ancaman. Beberapa hal yang penting untuk dipahami dalam menciptakan argumentasi munculnya persepsi ancaman adalah:

1. Terdapat hubungan sejarah antar aktor yang saling berkaitan;
2. Terdapat pengalaman antar aktor yang berlandaskan ancaman di masa lalu;
3. Terdapat keseimbangan kapabilitas misalnya dalam bidang militer, diplomatik, atau ekonomi;
4. Terdapat faktor struktural yang ada diantara aktor;
5. Rekam jejak keterlibatan aktor dalam tatanan hukum yang diikuti bersama; dan
6. Terdapat isu dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan yang menyinggung diantara aktor atau wilayah aktor.

Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa adanya persepsi ancaman memang dikendalikan dari keterkaitan beberapa faktor yang menyinggung antara Cina dan Amerika Serikat. Selain itu, ancaman diketahui berbentuk bukan dari suatu pandangan yang statis melainkan mengalami perkembangan yang fluktuatif dan dinamis dalam hubungan antaran Cina dan Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Cina memiliki hubungan sejarah yang saling berkaitan di masa lalu terlebih ketika fase perang dingin dalam halpenyebaran ideologi. Pada masa perang dingin Amerika Serikat menyebarkan paham liberalisme dan fokus untuk membendung paham Sosialis-Komunis yang disebarkan oleh Cina dan Uni Soviet. Ketakutan akan efek domino yang terjadi jika satu negara jatuh ke tangan komunis adalah salah satu landasan dasar Amerika Serikat membentuk NATO pada tahun 1949. Teori efek domino

adalah suatu teori yang menerangkan bahwa jika satu negara di sebuah kawasan berada di bawah pengaruh komunisme, maka negara di sekitarnya akan mengikuti seperti efek domino (Leeson, 2009). Ancaman pada masa lalu yang diberikan Cina kepada Amerika Serikat juga dapat dijadikan landasan terhadap kemungkinan yang akan terjadi di masa sekarang dan masa depan.

Hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina baik di bidang militer, diplomatik dan ekonomi dapat dijadikan argumentasi. Pada bidang ekonomi, munculnya Cina sebagai kekuatan ekonomi baru membuat "pusat gravitasi" ekonomi berpindah dari Eropa Barat ke Asia Pasifik. Sektor perekonomiannya mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa puluh tahun terakhir ini. Hal ini menyebabkan Cina berada dalam posisi yang hampir sama dengan Amerika Serikat dalam pengaruh geopolitik internasional. Kebangkitan Cina tidak hanya dalam sektor ekonomi namun juga di sektor militer. DominasiCina di Asia Timur menjadi semakin kuat karena peningkatan angkatan bersenjatanya. Jika peningkatan GDP China terjadi secara terus menerus dan dialokasikan ke kekuatan militer akan terciptanya pangkalan militer yang besar yang kemudian dapat menyaingi dominasi kekuatan militer Amerika di Asia Timur (Art, 2017). Amerika Serikat dan Cina berada di posisi pertama dan kedua dalam negara dengan anggaran pertahanan tertinggi di dunia. Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), anggaranmiliter pertahanan Amerika Serikat di tahun 2018 sebesar 649 miliar dollar AS sedangkan anggaran militerpertahanan Cina sebesar 250 miliar dollar AS (Setiawan, 2019). Sementara dalam aspek diplomatik Cina jugamencoba mengembangkan dan menggunakan pengaruhnya di dunia internasional untuk membentuk kembali aturan dan lembaga dari sistem internasional untuk lebih melayani kepentingannya. Negara- negara lain dalam sistem yakni yang mengalami penurunan hegemoni akan mulai melihat Cina sebagai sebuah ancaman keamanan yang sedang berkembang. Mereka memperkirakan akibat dari hasil perkembangan ini akan menimbulkan ketegangan, kecurigaan, dan konflik yang menjadi fitur khas dari terjadinya transisi kekuasaan (Art, 2017).

Roda kekuasaan akan selalu berputar dan berubah. Kekayaan dan kekuasaan tidak akan selamanyamengikuti tatanan dunia lama yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Eropa. Negara-negara mulai bermunculan untuk mendominasi melalui ide serta agenda mereka untuk tatanan global baru. MelemahnyaAmerika Serikat akan sulit untuk mempertahankan sistem tatanan lama. Lembaga hasil dari adanyaliberalisme seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

dan norma seperti multilateralisme dapat membuka jalan untuk menghentikan pengaruh ideologi, sistem blok, jaringan merkantilisme serta persaingan regional.

Tatanan liberal institutional klasik dirancang dan dibentuk di Barat. Sementara, negara berkembangkebanyakan berasal dari non-Barat yang memandang dunia dari segi budaya, politik, dan pengalaman ekonomi melalui masa lalu yang anti imperial dan kolonialisme (Ikenberry, 2011). Mereka tidak peduli terkait dengan masalah krisis yang dihadapi oleh negara kapitalis yakni kemunduran perekonomian dunia. Krisis ini menyerang Amerika Serikat dan menyebabkan mereka meragukan Amerika Serikat yang notabenenya adalah pemimpin perekonomian dunia. Hal ini menimbulkan munculnya perubahan serta transisi ide dan prinsip yang mendasari tatanan global.

Cina mencoba memanfaatkan kesempatan ini dengan menggunakan kekuatan dan kekayaannya yang semakin meningkat untuk mendorong pembaruan tatanan politik dunia. Cina mencoba mengembangkan dan menggunakan pengaruhnya di dunia internasional untuk membentuk kembali aturan dan lembaga dari sistem internasional untuk lebih melayani kepentingannya. Negara lain dalam sistem yakni yang mengalami penurunan hegemoni akan mulai melihat Cina sebagai sebuah ancaman keamananyang sedang berkembang.

Amerika Serikat menganggap bahwa Cina berpotensi menjadi poros baru. Dalam aspek ekonomi, Cina memang mampu menyaingi Amerika Serikat yang sukses menghadapi krisis keuangan secara lebih baik. Hal ini akan membuat dominasi Amerika Serikat sebagai Negara hegemon yang memiliki kekuatan besar akan berakhir. Namun, demokrasi dan supremasi hukum masih menjadi ciri modernitas dan standar global untuk pemerintahan yang sah. Belum ditemukan bukti bahwa negara otoriter dapat menjadi masyarakat yang benar-benar maju tanpa bergerak kearah demokrasi liberal (Ikenberry, 2011).

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Amerika Serikat merasa terancam dengan perkembangan teknologi artificial intelligence buatan Cina. Hal tersebut dikarenakan privasi dan keselamatan yang menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Amerika Serikat. Cina yang menganut pahamkomunisme mewajibkan perusahaan untuk membantu pekerjaan intelijen nasional dengan memberikan otoritas akses ke datanya yang mengakibatkan beberapa negara mempertimbangkan kembali menggunakan teknologi AI

dari Cina atau perusahaan Huawei yang merupakan perusahaan Cina sebagai pencetus pertama. Adanya kontrol dari Pemerintah Cina itulah yang menyebabkan Amerika Serikat merasatidak aman.

Pandangan Amerika Serikat tersebut mempunyai alasan karena perbedaan paham antara AmerikaSerikat dengan Cina serta adanya berbagai konflik yang terjadi baik di masa lalu maupun masa sekarang. Sebagai contoh pada tahun 2011, pemerintah Amerika Serikat mendeklarasikan serangan dunia maya yangmirip dengan tindakan perang, dapat dihukum dengan cara militer konvensional sebagai bentuk upaya terakhir. Misalnya, keterlibatan dunia maya yang diarahkan oleh satu negara ke negara lain dianggap sebagai bagian dari rangkaian konflik normal. Seperti yang dijelaskan oleh Nye (Maness, The Dynamics of Cyber Conflict Between Rival Antagonist, 2014), dekat dengan pergeseran dalam operasi strategis setelah tahun 2001 karena terorisme, meningkatnya ketakutan akan pertempuran dunia maya dan ancaman telah membawa reorientasi urusan militer. Departemen Pertahanan mencatat teknologi skala kecil dapat memiliki dampak yang tidak proporsional dengan ukurannya; musuh potensial tidak harus membangun sistem senjata yang mahal untuk menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan nasional A.S (Cyberspace,2011). Untuk menghadapi ancaman ini, aktor di seluruh dunia mempromosikan berbagai cara untuk memperkuat keamanan cybernya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan atau membentuk badan serta institusi baru untuk menghadapinya. Salah satu contoh adalah mengapa Amerika Serikat melarang perusahaan menggunakan peralatan jaringan Huawei pada 2012 dan mengapa perusahaan itu ditambahkan ke Biro Industri dan Daftar Entitas Keamanan Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada Mei, mengikuti perintah eksekutif dari Presiden Donald Trump yang secara efektif melarang Huawei dari Komunikasi AS karena dengan peningkatan artificial intelligence yakni face recognition dapat mengancamkeamanan nasional Amerika Serikat. Selain itu, negara-negara semakin memperkuat keamanan cyber nya dengan membentuk badan-badan seperti Amerika Serikat yang membentuk Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) yang ada di bawah Department of Homeland Security Amerika Serikat dan juga Cyber Threat Intelligence Integration Center (CTIIC), sementara di Eropa terdapat EU Agency for cybersecurity (EN ISA) dan berbagai badan lainnya.

Karena keamanan siber merupakan hal yang cukup penting di era globalisasi ini, seharusnya diiringi dengan peningkatan keamanan yang semakin baik. Badan-badan

keamanan siber yang terdapat di masing-masing negara perlu saling bekerjasama satu dengan lainnya untuk menekan perkembangan kejahatan siber. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan salah satu institusi besar yang menaungi banyak negara seharusnya mulai memperhatikan peningkatan kejahatan dunia maya yang semakin menghawatirkan dengan membentuk badan resmi untuk menanggulangi atau meminimalisir kejahatan siber.

DAFTAR PUSTAKA

Andreeva, E. (2016). The Impact of Threat Perception on National Role Conceptions: the Cases of Turkey and Rusia. Budapest, Hungary: Central European University.

Anthony W. Chen, J. C. (2019). The US-China Trade War: Dominance of Trade or Technology? Applied Economic Letters Article Journal.

Anthony W. Chen, J. C. (2019). The US-CHina Trade War: Dominance of Trade or Technology? Applied Economics Letters Article Journal.

Art, R. J. (2017). The United States and the Rise of CHina. International Politics: Enduring concepts and contemporarty issues, 13th edition, 393-399.

Clarke, R. A. (2010). Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It. New York: Harper Collins.

Cohen, R. (1978). Threat Perception in International Crisis. Political Science Quarterly, 93, 93-107.

Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.

Cyberspace, D. o. (2011). July Report. http://www.defense.gov/news/d20110714cyber.pdf

Diah, S. R. (2018, Maret 24). Balas Trump, China Bakal Terapkan Tarif Impor untuk 128 Produk AS. Dipetik Oktober 26, 2019, Ekonomi Kompas: https://ekonomi.kompas.com/ read/2018/03/24/142356226/balas-trump-china-bakal-terapkan- tarif-impor-untuk-128-produk-as

Doyle, M. W. (1983). Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs. Philosophy & Public Affairs, 12, 205-235. Frederick, W. (2011). ITU National Cybersecurity Strategy Guide. Geneva: International Telecommunication Unit (ITU).

Fund, S. R. (2015). Silk Road Fund: Overview. Dipetik Oktober 2019, dari Silk Road Fund: http://www.silkroadfund.com.cn/ enwap/27365/27367/26761/index.html

Haenlein, A. K. (2019). Siri, Siri in my Hand, who's the Fairest in the Land? on the Interpretations, Ilustrations and Implications of Artificial Intelligence. 62(1).

Haverland, J. B. (2012). Causal-Process Tracing. Dalam J. B. Haverland, Designing Case Studies: Explanatory Approaches in Small-N Research (hal. 79). UK: Palgrave Macmillan.

Hersh, S. (2010, November 1). The Online Threat: Should we be worried about cyber war? New Yorker. Huberman, M. d. (1992). Analisis Data Kualitatif (diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Ikenberry, J. G. (2011). The Future of the Liberal World Order: Internationalism After America. Foreign Affairs, 52-68.

Indonesia, U. P. (2012). Kajian Strategis Keamanan Cyber Nasional: Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional di Bidang Keamanan Cyber. Jakarta.

Indrajit, P. R. (2019, Januari 8). Kebangkitan Teknologi Informasi di China. E-Artikel Sistem Informasi. Jervis, R. (1976). Perception and Misperception in International Politics. New Jersey: Princeton University Press.

Journal, T. W. (2011). Cyber Combat: Act of War. The Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304563104576355623135782718

Kompas. (2019, Mei 20). Ada Apa dengan 5G, Pokok Permasalahan AS dengan Huawei? Dipetik November 2019, Kompas.com: https://sains.kompas.com/read/2019/05/20/ 193600223/ ada-apa- dengan-5g-pokok-permasalahan-as-dengan-huawei?page=all

Lee, K. F. (2018). AI Super-powers: China, Silicon Valley and the New World Order. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

Leeson, P. T. (2009). The Democratic Domino Theory: An Empirical Investigation. American Journal of Political Science, 533-551.

Liu, W. T. (2018). Understanding the U.S.-China Trade War. China Economic Journal, 11, 319-340.

Maness, B. V. (2014). The Dynamics of Cyber Conflict Between Rival Antagonist. Journal of Peace Research, 347-360.

Maness, B. V. (2014). The Dynamics of Cyber Conflict Between Rival Antagonists 2001-11. Journal of Peace Research, 51, 347-360.

Nanang, M. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

News, C. (2019, Oktober 16). Chinese Facial Recofnition Tech Installed in Nations Vulnerable to Abuse. Dipetik Desember 2019, dari CBS News: https://www.cbsnews.com/news/china-huawei-face- recognition-cameras-serbia-other-countries-questionable-human-rights-2019-10-16/

Policy, C. I. (2018). China AI Development Report. Tsinghua University. CISTP.

Relations, C. o. (2019). Is 'Made in China 2025' a Threat to Global Trade? Dipetik November 2019, dari Council on Foreign Relations: https://www.cfr.org/backgrounder/made-china-2025-threat-global- trade

Setiawan, S. R. (2019, April 30). 10 Negara dengan Anggaran Pertahanan Tertinggi di Dunia Apa Saja?

Dipetik April 14, 2020, dari Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2019/04/30/151759726/10-negara-dengan-anggaran- pertahanan-tertinggi-di-dunia-apa-saja

Shephered, B. D. (2019, January). U.S Legislation Steps up Pressure on Huawei and ZTE, CHina Calls it Hysteria. Dipetik Oktober 2019, dari Reuters: https://www.reuters.com/article/us-usa-china- huawei-tech/u-s-legislation-steps-up-pressure-on-huawei-and-zte-china-calls-it-hysteria- idUSKCN1PA2LU

Vaswani, K. (2019). Huawei: Kisah Perjalanan Perusahaan Kontroversial yang Dituduh sebagai Mata-Mata Cina. Dipetik November 2019, dari bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47477958

Yu, H. (2017). Motivation Behind China's 'One Belt, One Road Initiatives' and Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank. Journal of Contemporary China, 26, 353-368.